

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari kecenderungan sentralistik menjadi desentralisasi. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah agar lebih kreatif sehingga mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), peranan PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD), efektifitas PAD dan elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi periode 2001 – 2006. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian daerah, model efektifitas PAD, dan model elastisitas PAD. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peranan PAD terhadap TPD sebesar 7,04% dengan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi sebesar 6,42%; peranan PAD terhadap PTD sebesar 7,44% dan terhadap PRD sebesar 9,28% dengan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 11,79%; yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal maupun tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi rendah sekali (kurang dari 25%) sehingga mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif. Dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian, Kabupaten Banyuwangi belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Efektifitas PAD sebesar 115,01%; maka dapat disimpulkan kemampuan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya pada era otonomi daerah dikategorikan efektif. Koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 2,11; maka dapat dinyatakan bahwa hasil tersebut adalah elastis ($e > 1$) yaitu perubahan PAD akan peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemandirian Daerah, Efektifitas PAD, Elastisitas PAD.

Abstract

Going into effect of Undang-Undang No.22 year 1999 which later innovated with Undang-Undang No.32 year 2004 about local governance and Undang-Undang No.25 year 1999 which later innovated with Undang-Undang No.33 year 2004 about monetary counter balance between central government and local government, having meaning that happened change of governance system in Indonesia from tendency of sentralistik become decentralization. Management of autonomy and decentralization bring consequence to local government to be more creative so that can developing potency of local source of earnings to defray management of governance and execute service function to society (public services) in order to improving prosperity of society and prosperity of area. This research aim to know how big role of Earnings of Local Genuiness (PAD) to Totalizing of Local Acceptance (TPD), role of PAD to Total of Local Expenditure (PTD) and Local Routine Expenditure (PRD), efektifitas of PAD and elasticity of PAD to Regional Gross Domestic Product (PDRB) Kabupaten Banyuwangi period 2001 - 2006. Analysis model which used in this research were degree of fiscal decentralization model, local independence level model, efektifitas of PAD model, and elasticity of PAD model. Result of this research obtained conclusion that role of PAD to TPD equal to 7,04% with degree of fiscal decentralization of Kabupaten Banyuwangi equal to 6,42%; role of PAD to PTD equal to 7,44% and to PRD equal to 9,28% with local independence level of Kabupaten Banyuwangi equal to 11,79%; indicating that degree of fiscal decentralization and also local independence level of Kabupaten Banyuwangi low once (less than 25%) so that have monetary relation pattern between central government with local government having the character of instruktif. Can be said that by during period of research, Kabupaten Banyuwangi not yet can execute area autonomy. Efektifitas of PAD equal to 115,01%; hence can be concluded ability of Kabupaten Banyuwangi in running its duty at autonomous era is categorized effective. Elasticity coefficient of PAD to PDRB on the basis of price go into effect equal to 2,11; hence can be expressed that the result is elastic ($e > 1$) that is change of PAD will be sensitive to change of PDRB that happened.

Keywords : Decentralization, Earnings of Local Genuiness, Degree of Fiscal Decentralization, Local Independence Level, Efektifitas of PAD, Elasticity of PAD.